

Meneropong Komitmen HAM Calon Presiden

Oleh: Wahyudi Djafar¹

Dalam tahun 2009, rakyat Indonesia disibukkan dengan hiruk pikuk hajatan demokrasi lima tahunan. Setelah sebelumnya berlangsung pemilihan umum anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), agenda selanjutnya adalah memilih pasangan presiden dan wakil presiden, yang akan memimpin pemerintahan republik beserta segenap warganya, untuk lima tahun berikutnya. Pemilihan umum yang dilakukan secara teratur ini, dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme evaluasi dan klarifikasi terhadap segala macam persoalan publik kenegaraan. Sekaligus menghindari tumbuhnya kekuasaan politik yang despotis.

Salah satu persoalan publik utama yang dihadapi bangsa ini, dan tak kunjung menemui titik terang, ialah persoalan yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan, dan penegakkan hak asasi manusia. Meskipun rezim telah berganti berulang kali, namun hak asasi manusia masih menjadi soal yang senantiasa untuk diposisikan sebagai anak tiri, dan terus-menerus minim perhatian. Bukan berupaya untuk menyegearkan pemenuhan hak asasi yang menyeluruh, negara justru seringkali menciderai dan melanggar hak asasi. Lemahnya komitmen negara terhadap penegakkan hak asasi manusia kian menunjukkan timpangnya relasi antara negara dengan masyarakatnya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan (*souvereignty*) tertinggi tidak sepenuhnya hak-hak asasinya dipenuhi oleh negara sebagai pelaksanaan kekuasaan.

HAM Sebagai Tanggung Jawab Negara

Relasi negara dan masyarakat sesungguhnya memberi gambaran adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak-hak warganegara, sebagai kompensasi dari kepatuhan dan penundukan diri tersebut. Hubungan ini dilegitimasi dan dilegalkan menggunakan wadah konstitusi, sebagai media kontrak sosial dan politik. Karenanya konstitusi berposisi sebagai norma tertinggi (*higest norm*) dari suatu negara, yang membebani negara dengan kewajiban untuk menjalankan segenap kehendak rakyat. Negara beserta keseluruhan instrument penyangganya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan terbaik guna menyelesaikan beragam persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Ginsbrug mengungkapkan, hubungan kontraktual tersebut memiliki keterkaitan antara principal dan agen. Principal sendiri tidak lain adalah rakyat, yang selanjutnya menyerahkan kepercayaannya kepada para politisi sebagai agen mereka. Para agen ini memiliki tugas untuk memenuhi keinginan kolektif rakyat sebagai kehendak umum (*volonte generale*), serta pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dan, atas nama rakyat pula konstitusi itu dibentuk (Ginsbrug, 2003: 23).

Kewajiban negara (*state obligation*) terhadap upaya pemenuhan hak asasi manusia diwujudkan setidaknya melalui beberapa instrument berikut: Pertama, negara beserta seluruh komponen dan organ-organ yang dimilikinya memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menegakkan, dan memajukan pemenuhan hak asasi manusia. Negara tidak diperkenankan mencampuri atau menghalangi segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya. Intervensi hanya diperbolehkan guna mendorong masyarakat agar mampu memenuhi dan

¹ Peneliti Hukum dan Konstitusi di Jakarta, bekerja pada Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

manjamin kelangsungan penikmatan hak asasi tersebut; Kedua, negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrument hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warganegara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau kelompok tertentu; Ketiga, negara harus berperan aktif dalam mengupayakan pemajuan, pemenuhan dan penegakkan hak asasi manusia bagi setiap warganegara, tidak mengurangi hak asasi warganegara tertentu. Dan, harus pula dipastikan bahwa setiap warganegara memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mencukupi segala macam kebutuhan asasinya.

Untuk itu, penting memerhatikan sejauhmana komitmen para calon presiden yang akan berkontestasi dalam ajang politik lima tahunan, pemilihan umum presiden 2009, terhadap upaya pemenuhan hak asasi manusia. Setidaknya dari komitmen meraka tersebut, selanjutnya kita dapat memprediksi peta dan situasi pemenuhan hak asasi manusia di negeri untuk lima tahun ke depan.

Luka Lama Terus Membekas

Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu presiden 2009, adalah kita dihadapkan pada satu kekhawatiran akan masa depan hak asasi manusia di Indonesia, dalam genggaman para calon presiden dan wakil presiden yang saat ini tengah bertarung. Bawa tidak ada satu pun capres dan cawapres yang memiliki latar belakang bersih dari kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Dalam memori pikiran kita tentunya masih tersimpan, tentang segala macam tingkah polah mereka—para petarung kekuasaan—yang seringkali mengabaikan hak asasi. Baik hak asasi manusia yang kadarnya sipil politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, yang secara sadar maupun tak sadar terus-menerus mereka langgar, ketika berkuasa pada rezim-rezim sebelumnya.

Tidak hanya kekhawatiran akibat latar belakang hitam para calon presiden dan wakil presiden, kita juga dihantui oleh ancaman penetrasi kapital yang massif dari negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan asing, yang sedikit banyak mengancam upaya pemenuhan hak asasi. Benar, tidak ada diantara mereka yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Keberpihakan hanya sebatas janji mulut, yang terucap saat kampanye berlangsung, sekedar untuk menambah perolehan suara. Sementara setelah menduduki kursi empuk kekuasaan, kesejahteraan dan kemakmuran hanya tinggal janji yang tiada berarti. Tentu luka lama itu akan terus membekas, mengingatkan kita tentang janji-janji kosong mereka semenjak masa yang lampau.

Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Capres dan Cawapres	Bentuk Pelanggaran
Megawati-Prabowo	<ul style="list-style-type: none">- Disahkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melegalkan outsourcing, mengurangi job security, dan membatasi hak mogok.- Privatisasi dan divestasi Indosat, Semen Gresik dan Semen Padang.- Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.- Komersialisasi pendidikan akibat minimnya anggaran pendidikan yang dikucurkan negara.- Privatisasi air akibat keluarnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.- 23 Kasus pelanggaran hak atas kesehatan, baik malpraktik maupun penelantaran pasien.- Prabowo diduga kuat terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis dan pelanggaran HAM di Timor Timur.
SBY-Boediono	<ul style="list-style-type: none">- Mengeluarkan paket reformasi kebijakan investasi yang tidak berpihak rakyat, salah satu diantaranya lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres No. 36 Tahun 2005.- Menggilanya komersialisasi pendidikan akibat lahirnya UU Badan Hukum

	<p>Pendidikan, yang menyamakan institusi pendidikan dengan perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyewakan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan, dengan dikeluarkannya PP No. 2 Tahun 2008. - Tidak adanya standar pelayanan kesehatan yang mencerminkan pemenuhan hak asasi. Terbukti dengan masih adanya 13 pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. - Boediono menyetujui sejumlah privatisasi dan divestasi BUMN dan menyatakan akan terus melanjutkan program tersebut.
JK-Wiranto	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika terjadi tragedy Nunukan, JK menjabat sebagai Menko Kesra. Pemerintah dinyatakan bersalah oleh PN Jakarta Pusat. - Ketika rezim SBY-Kalla berkuasa terjadi penyerangan terhadap forum Aliansi Masyarakat Tani Mamuju, dan sejumlah kriminalisasi petani di daerah lain. - 14.000 kasus busung lapar dan gizi buruk di enam provinsi. - Wiranto diduga kuat terlibat dalam penggaran HAM berat di Timor Timur.

Sumber: diolah dari LBH Jakarta, Rekam Jejak Capres-Cawapres dalam bidang Hak EKOSOB dan Agenda Promosi Hak EKOSOB 2009-2014, serta diformulasikan dari berbagai sumber lainnya.

Lemahnya Komitmen HAM

Selain sejumlah fakta pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, kita juga dihadapkan dengan lemahnya komitmen terhadap gerak langkah pemenuhan dan penegakkan HAM, para capres dan cawapres di pemilu presiden 2009. Lemahnya komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari penelusuran atas visi misi dan agenda kebijakan mereka jika terpilih. Khususnya yang berkait erat dengan hak asasi manusia. Apakah HAM sudah menjadi pijakan bagi pembangunan visi dan misi pemerintahan yang hendak mereka ciptakan, sekedar menjadi bagian kecil atau bahkan terlupakan sama sekali dari cita-cita pemerintahan jika terpilih?

Penelusuran menemukan beberapa fakta terkait visi misi calon. Dari tiga calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pilpres 2009, tidak ada satu pun diantara mereka yang menempatkan 'hak asasi manusia' sebagai basis visi mereka, yang akan diperjuangkan dalam lima tahun ke depan. Sedangkan dalam misi perjuangan mereka, hanya pasangan JK-Wiranto yang secara eksplisit menyantumkan 'hak asasi manusia' sebagai misi yang akan dicapai dalam pemerintahannya. Sementara dua yang lain—Megawati-Prabowo dan SBY-Boediono—abstain dari misi hak asasi manusia. HAM hanya implisit berada dalam misi-misi lainnya, tidak menjadi salah satu cita-cita pemerintahan yang hendak diwujudkan.

Komparasi Visi Misi Capres dan Cawapres

	Mega-Prabowo	SBY-Boediono	JK-Wiranto
Visi	Gotong royong membangun kembali Indonesia raya yang berdaulat bermartabat adil dan makmur	Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan	Indonesia yang adil, mandiri dan bermanfaat
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat. - Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan. - Menyelenggarakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. - Memperkuat pilar-pilar demokrasi. - Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. - Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

	pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif.		<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang menjamin kebhinekaan. - Mewujudkan bangsa yang aman, tenram dan damai dengan penegakan hukum dan HAM. - Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa - bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik.
--	---	--	---

Sumber: diformulasikan dari <http://megaprabowo.com>, <http://sbypresidenku.com>, dan <http://m.kwiranto.com>.

Memerhatikan data-data di atas, memundurkan keinginan kita untuk menaruh harapan yang cukup luas bagi mereka, tentang nasib penegakkan HAM di Indonesia untuk lima tahun mendatang. Sebab dari kerangka filosofis rencana pembangunan pemerintahan mereka, HAM masih dimaknai sebagai satu bangunan yang sempit, tidak komprehensif, ruang lingkupnya hanya sebatas pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Sementara pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya belum ditempatkan sebagai kerja penegakkan hak asasi manusia. Masih menempel pada sektor-sektor lain, ekonomi khususnya, artinya pada soal ekonomi dan sosial, capres dan cawapres memandangnya sebagai masalah pemerataan, bukan pemenuhan hak asasi warganegara.

Lemahnya komitmen capres dan cawapres terhadap hak asasi manusia, terlihat pula dari mengambang dan tidak tegasnya sejumlah janji dan kontrak politik, kebijakan yang hendak mereka ciptakan saat terpilih. Janji pemenuhan hak asasi masih terlalu kabur dan tidak menyentuh persoalan hak asasi yang sesungguhnya. Lagi-lagi agenda pemenuhan hak asasi manusia, pemaknaannya masih sebatas pada pemenuhan hak sipil dan politik, sedangkan hak sosial, ekonomi dan budaya belum dianggap sebagai tanggung jawab negara, yang sifatnya absolut (*obligation of conduct*).

Sejumlah Janji Capres dan Cawapres di Bidang HAM

Capres dan Cawapres	Janji Pemenuhan HAM
Megawati-Prabowo	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan demokrasi dalam proses reformasi. - Menjamin kebebasan pers. - Menjamin hak asasi manusia.
SBY-Boediono	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan tanpa diskriminasi. - Menjamin kebebasan dan hak asasi. - Melindungi kaum perempuan dan anak. - Politik nondiskriminasi.
JK-Wiranto	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakkan HAM menjadi prioritas. - Mengadili pelanggar HAM jika terdapat kesalahan dan bukti yang kuat. - Semua warga negara punya hak yang sama. - Komitmen terhadap kebebasan pers.

Sumber: KOMPAS, Selasa, 30 Juni 2009.

Sejumlah janji di atas memberi bukti masih mengambang dan belum adanya janji konkret upaya pemenuhan hak asasi manusia. Janji penegakkan HAM berhenti sebatas slogan-slogan kampanye yang dipastikan minim implementasi, karena tidak adanya indikator konkret, yang dapat

digunakan oleh masyarakat untuk mengukur keseriusan janji-janji politik mereka. Selama ini masyarakat seringkali diterlantarkan hak asasinya oleh negara, masyarakat dipaksa berjuang sendiri dalam memenuhi hak asasinya.

Mengambangnya agenda HAM capres dan cawapres menjadikan makin jauhnya harapan masyarakat untuk dipenuhi hak asasinya di pemerintahan baru hasil Pemilu 2009. Hal lain yang terungkap dari sejumlah agenda HAM di atas adalah tidak seimbangnya janji pemenuhan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, dengan janji pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dari serangkaian agenda kebijakan capres dan cawapres di atas keseluruhan penekanannya ialah pada agenda penegakkan hak sipil politik. Akan tetapi tidak ada satu pun agenda mereka yang secara eksplisit menyebutkan agenda pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya. Janji untuk EKOSOB hanya sebatas pada janji perlindungan perempuan dan anak yang coba dicantumkan dalam agenda kebijakan pasangan Mega-Prabowo. Seperti telah disebutkan di atas, nampaknya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya belum dipahami oleh mereka sebagai sebuah bentuk kewajiban negara. Janji pemenuhan hak EKOSOB justru menyebar dalam agenda-agenda kebijakan yang lain, bukan dalam kerangka pemenuhan hak asasi.

Menimbang janji-janji pemenuhan HAM dari pasangan capres dan cawapres di 2009, dapat diprediksikan kemungkinan masih gelapnya peta pemenuhan dan penegakkan hak asasi manusia dalam lima tahun mendatang. Apalagi tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki *track record* bersih dari tindak pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menjadikan makin buramnya harapan masyarakat untuk dipenuhi hak-hak asasinya. Namun demikian, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, masyarakat musti tetap optimis, untuk terus menuntut kepada negara, khususnya pemerintah yang berkuasa, guna melakukan pemenuhan hak asasi manusia setiap warganegara. []